

## **PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN: STABILITAS POLITIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**Sari Angriany Natonis\***,

Universitas Nusa Cendana

\*E-mail: sari.angriany.natonis@staf.undana.ac.id

### **Abstract**

This study aims to empirically examine the effect of political connections on corporate social responsibility disclosure, and the moderating effect of political stability on the influence between political connection and corporate social responsibility disclosure. Data used in this study comes from company sustainability reports, company annual reports, and the world bank website. The sample of this study consists of 190 high profile industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2019-2021. Corporate social responsibility disclosure is measured using CSRI based on the GRI 4 standard, the measurement of political connection using Political Exposed Persons in Bank Indonesia Regulations, while political stability is measured by the political stability index issued by World Governance Index. The analysis technique used in this study is Ordinary Least Square regression with the help of STATA 14. The results showed that (1) political connections had a significant positive effect on corporate social responsibility disclosure, (2) political stability does not moderate the effect of political connections on corporate social responsibility disclosure, but political stability has a significant positive effect directly on corporate social responsibility disclosure.

**Keywords:** corporate social responsibility disclosure, political connection, political stability.

### **PENDAHULUAN**

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (selanjutnya disingkat CSR) saat ini masih menjadi isu menarik dalam lingkungan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat (Avram dkk., 2018; Galvão dkk., 2019; Schmidt dan Cracau, 2017). Isu CSR di Indonesia bahkan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Keseriusan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan dirumuskannya dalam aturan yang mewajibkan pelaksanaan CSR di Indonesia, yakni Undang-Undang (untuk selanjutnya disingkat UU) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perhatian pemerintah terhadap isu CSR ini semakin dituntut dengan adanya agenda dunia yang dirumuskan bersama dengan negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015, yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (untuk selanjutnya disingkat SDGs), dengan tiga fokus utama *planet, people, dan prosperity* (Jones, 2017).

Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan CSR, namun hingga saat ini pelaksanaan CSR di Indonesia masih

belum maksimal. Menurut kajian gabungan oleh *ASEAN CSR Network* (ACN) dan *National University of Singapore* (NUS) pada tahun 2016, yang berjudul "*Sustainability Reporting in ASEAN*", Indonesia hanya mencatat skor 31,4% untuk indikator lingkungan. Angka ini terendah dibandingkan Malaysia (36%), Singapura (37,1%), dan Thailand (41,4%). Selain berkaitan dengan isu lingkungan, isu CSR kini meluas ke ranah politik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus penyelewengan dana CSR oleh sejumlah pejabat, seperti kasus korupsi dana CSR dari PT Sang Hyang Shri oleh wakil ketua DPRD Majalengka Ali Suharman (Mardiana, 2016) dan berbagai kasus lainnya.

Kasus penyelewengan dana CSR tersebut menunjukkan bahwa masalah CSR kini meluas hingga ke lingkungan politik, dimana pelaksanaan CSR menjadi tidak sesuai dengan tujuannya dan menjadi rentan korupsi ketika bisnis sudah dikaitkan dengan politik. Di Indonesia sendiri kini politik sangat erat kaitannya dengan bisnis. terbukti dari data Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bahwa 41% posisi komisaris di perusahaan BUMN diisi oleh pejabat pemerintah (Ombudsman, 2017). Perusahaan bisa memperoleh manfaat

lebih dengan adanya koneksi politik tersebut, dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi (Khan dkk., 2016; B. Liu dkk., 2018; Muttakin dkk., 2018). Praktik pemburuan pendapatan (*rent-seeking*) dengan cara monopoli dengan bermodalkan kekuasaan politik dalam bisnis pun rentan terjadi (Krueger, 1974). Teori *rent-seeking* digunakan dalam sejumlah penelitian yang berkaitan dengan praktik CSR, yakni perusahaan-perusahaan yang terhubung secara politik cenderung lebih banyak terlibat dalam kegiatan CSR serta berinvestasi dalam CSR sebagai bentuk imbalan untuk dukungan pemerintah yang berkelanjutan (Li dkk., 2014). Terbukti bahwa perusahaan yang membelanjakan lebih banyak CSR untuk terikat dengan pemerintah menerima imbalan masa depan yang lebih besar berupa subsidi pemerintah (Lin dkk., 2015; Zhang, 2017).

Hal berbeda ditunjukkan oleh beberapa penelitian lain. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan karena dimotivasi oleh keinginan untuk dilegitimasi ditengah masyarakat (Luo dkk., 2013; Ahmad dan Hossain, 2015), namun dengan adanya koneksi politik dapat membantu perusahaan mengurangi kebutuhan manajemen untuk menggunakan pengungkapan CSR sebagai strategi legitimasi karena menghubungkan perusahaan dengan tokoh politik utama dapat mengurangi potensi tekanan stakeholder yang berasal dari kinerja CSR yang buruk (Woodward dkk., 1996).

Berbagai hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, meskipun masih terdapat *gap* tentang pengaruhnya. Lingkungan hukum dan kualitas kelembagaan negara tempat perusahaan beroperasi dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku perusahaan tersebut (Boubakri dkk., 2012; Li dkk., 2014). Salah satu aspek dari kualitas kelembagaan negara yakni stabilitas politik. Perusahaan yang terkoneksi politik di Indonesia sangat bergantung pada manfaat yang dihasilkan dari kekuatan koneksi politik tersebut (Fisman, 2001), dan oleh karena itu perubahan dalam stabilitas politik yang terganggu bisa berdampak pada perubahan dalam kekuatan koneksi politik mereka. Stabilitas politik dapat membantu perusahaan yang memiliki koneksi politik untuk lebih memperoleh manfaat dari koneksi tersebut, sehingga peningkatan stabilitas politik meningkatkan pula kepastian manfaat dari koneksi politik, dan mengurangi kebutuhan perusahaan untuk menanggapi tekanan pasar

(Harymawan dan Nowland, 2016), termasuk mengurangi potensi tekanan yang berasal dari kinerja CSR yang buruk.

Berdasarkan fenomena CSR dan politik di Indonesia serta penelitian-penelitian sebelumnya maka penelitian ini menguji pengaruh koneksi politik perusahaan terhadap pengungkapan CSR perusahaan dan bagaimana pengaruh tersebut ketika terjadi perubahan dalam kualitas kelembagaan negara berupa stabil atau tidaknya politik negara.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility* atau CSR (Y). CSR diukur menggunakan Corporate Social Responsibility Index (CSRI). Instrumen pengukuran CSRI yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada instrumen Global Reporting Initiative (GRI) versi 4. Pengukuran CSRI ini dilakukan melalui content analysis dalam mengukur variasi dari CSRI. Setiap kategori informasi pengungkapan CSR dalam instrumen penelitian diberi skor 1 jika kategori informasi yang diungkapkan ada dalam laporan tahunan, dan nilai 0 jika kategori informasi tidak diungkapkan di dalam laporan tahunan. Selanjutnya, skor dari setiap kategori informasi Sustainability Report dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah koneksi politik. Dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bank Umum dijelaskan bahwa individu yang terkoneksi secara politik dengan pemerintah yang disebut dengan *Politically Exposed Person* (selanjutnya disebut sebagai PEP). apabila diketahui terdapat salah satu dari pemegang saham mayoritas, dewan direksi, dan dewan komisaris perusahaan merupakan salah satu dari poin diatas maka perusahaan tersebut dinyatakan terkoneksi politik dan diberikan skor 1, dan sebaliknya jika tidak memiliki salah satu dari poin diatas maka dinyatakan tidak terkoneksi politik dan diberikan skor 0.

Variabel moderator dalam penelitian ini adalah stabilitas politik. Dalam penelitian ini stabilitas politik diukur dengan menggunakan *World Governance Index* yang disediakan oleh World Bank. Berdasarkan penilaian terhadap 10 kriteria tersebut, world bank kemudian

mengeluarkan Indeks stabilitas politik yang berkisar antara - 2,5 hingga 2,5, dengan nilai yang lebih tinggi mewakili situasi politik yang lebih stabil.

Penelitian ini juga melakukan kontrol terhadap beberapa variabel yang mempengaruhi pengungkapan CSR, yakni ROA, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan *leverage* perusahaan. Jenis data dalam penelitian ini yakni data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dan laporan *CSR/sustainability report* perusahaan yang menjadi sampel penelitian pada tahun 2019-2021 yang dapat diunduh melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Populasi penelitian ini adalah perusahaan dengan tipe industri *high profile industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni *regresi ordinary least square* dengan bantuan software analisis STATA 14.0. adapun sebelum melakukan pengujian regresi OLS peneliti terlebih dahulu melakukan *winsorize* data agar hasilnya bebas dari masalah normalitas. Teknik analisis ini dibagi menjadi tiga tahap, yakni analisis deksriptif untuk menganalisis data masing-masing variabel penelitian, analisis *pearson correlation* untuk menganalisis data hubungan antara dua variabel dalam penelitian, dan yang terakhir adalah analisis regresi *ordinary least square* untuk menentukan hubungan antara dua variable atau lebih dalam penelitian:

Model penelitian yang diuji yakni sebagai berikut:

$$CSRDI = a + \beta_1PCON + \beta_2CSCAL + \beta_3ROA + \beta_4CAGE + \beta_5LEV + \beta_6YEAR + \beta_7INDUSTRY + e$$

(Model. 1)

$$CSRDI = a + \beta_1PCON + \beta_2PSTAB +$$

$$\beta_3CSCAL + \beta_4ROA + \beta_5CAGE + \beta_6LEV + \beta_7YEAR + \beta_8INDUSTRY + e$$

(Model. 2)

$$CSRDI = a + \beta_1PCON + \beta_2PSTAB + \beta_3PCON*PSTAB + \beta_4CSCAL + \beta_5ROA + \beta_6CAGE + \beta_7LEVERAGE + \beta_8YEAR + \beta_9INDUSTRY + e$$

(Model. 3)

Dimana,

PCON : *Political Connection*  
 PSTAB : *Political Stability*  
 CSCAL : *Company Scale*  
 ROA : *Return On Assets*  
 CAGE : *Company Age*  
 LEV : *Leverage*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 1 pada lampiran menunjukkan bahwa nilai minimum variabel CSRI dari sampel penelitian tersebut yakni 0,022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut hanya melakukan pengungkapan pertanggung jawaban sosial sebesar 2% dari total pengungkapan yang ditetapkan oleh GRI 4, atau mengungkapan hanya 2 item dari total 91 item yang ditetapkan oleh GRI 4. Sementara nilai maksimal variabel CSRI yakni 0,934. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan sebesar 93% dari total pengungkapan, atau mengungkapkannya sebanyak 85 item dari total 91 item yang ditetapkan.

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

| Variable    | Obs | Mean   | Median | Min    | Max     |
|-------------|-----|--------|--------|--------|---------|
| CSRI        | 570 | 0.184  | 0.121  | 0.022  | 0.934   |
| DummyPolcon | 570 | 0.525  | 1.000  | 0.000  | 1.000   |
| PSTAB       | 570 | -0.500 | -0.512 | -0.615 | -0.373  |
| FirmSize    | 570 | 28.569 | 28.702 | 18.691 | 32.744  |
| ROA         | 570 | 0.024  | 0.023  | -0.525 | 0.394   |
| FirmAge     | 570 | 32.826 | 32.000 | 5.000  | 106.000 |
| Leverage    | 570 | 1.175  | 0.817  | -4.935 | 11.274  |

N : 190 Perusahaan; 570 Perusahaan-tahun  
 Sumber: Data Output STATA, 2019

Variabel koneksi politik dalam tabel 2 menunjukkan bahwa tiap tahun sampel terjadi perubahan koneksi politik dari perusahaan, yang diakibatkan oleh perubahan komisaris maupun direksi dalam perusahaan tersebut. Pada tahun 2019 perusahaan sampel terkoneksi politik yakni 102 perusahaan atau 53,6% dari total perusahaan sampel. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah perusahaan terkoneksi turun menjadi 98 perusahaan atau sekitar 51,5% dan pada tahun 2021 hanya bertambah 1 perusahaan saja.

Variabel stabilitas politik menunjukkan nilai minimum -0,615 yang terjadi pada tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa dari tahun sampel penelitian politik Indonesia sangat tidak stabil pada tahun 2019, terlihat dari nilai minimum yang jauh lebih kecil dari standar stabilitas politik yang ditetapkan oleh *World Governance Index* yakni -2,5 sampai 2,5 (semakin mendekati 2,5 dikatakan politik negara semakin stabil). Nilai maksimal variabel ini yakni -0,3729 yang terjadi pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa diantara tahun sampel yang ada, politik Indonesia lebih stabil pada tahun tersebut.

Tabel 2 Statistik Deskriptif Koneksi Politik

| Year  | Connection | No Connection | Total |
|-------|------------|---------------|-------|
| 2015  | 102        | 88            | 190   |
| 2016  | 98         | 92            | 190   |
| 2017  | 99         | 91            | 190   |
| Total | 299        | 271           | 570   |

Sumber: Data Output STATA, 2019

### Pearson Correlation

Hasil dari pearson correlation pada tabel 3 menunjukkan bahwa variabel CSRI berhubungan positif signifikan dengan koneksi politik, ukuran perusahaan, ROA, dan umur perusahaan. Sedangkan memiliki hubungan negatif signifikan dengan variabel moderasi PolconPSTAB. Variabel koneksi politik memiliki hubungan positif dan signifikan dengan ukuran perusahaan, serta memiliki hubungan negatif signifikan dengan variabel

stabilitas politik dan polconPSTAB. Variabel stabilitas politik berhubungan positif signifikan dengan variabel moderasi polconPSTAB. Variabel polconPSTAB memiliki hubungan negatif signifikan dengan ukuran perusahaan. Variabel ukuran perusahaan memiliki hubungan positif signifikan dengan ROA, umur perusahaan, dan leverage perusahaan. Variabel ROA memiliki hubungan positif signifikan dengan umur perusahaan.

Tabel 3 Hasil Pearson Correlation

|             | CSRI                 | DummyPolcon          | PSTAB               | PolconPSTAB          | FirmSize            | ROA                 | FirmAge           | Leverage |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|
| CSRI        | 1.000                |                      |                     |                      |                     |                     |                   |          |
| DummyPolcon | 0.242***<br>(0.000)  | 1.000                |                     |                      |                     |                     |                   |          |
| PSTAB       | 0.030<br>(0.471)     | -0.017<br>(0.690)    | 1.000               |                      |                     |                     |                   |          |
| PolconPSTAB | -0.225***<br>(0.000) | -0.961***<br>(0.000) | 0.216***<br>(0.000) | 1.000                |                     |                     |                   |          |
| FirmSize    | 0.420***<br>(0.000)  | 0.324***<br>(0.000)  | -0.009<br>(0.823)   | -0.308***<br>(0.000) | 1.000               |                     |                   |          |
| ROA         | 0.146***<br>(0.000)  | 0.000<br>(0.992)     | 0.050<br>(0.230)    | 0.018<br>(0.668)     | 0.125***<br>(0.003) | 1.000               |                   |          |
| FirmAge     | 0.179***<br>(0.000)  | 0.031<br>(0.462)     | 0.021<br>(0.622)    | -0.027<br>(0.527)    | 0.140***<br>(0.001) | 0.130***<br>(0.002) | 1.000             |          |
| Leverage    | -0.019<br>(0.651)    | -0.005<br>(0.911)    | -0.034<br>(0.416)   | -0.003<br>(0.942)    | 0.084**<br>(0.045)  | -0.022<br>(0.604)   | -0.023<br>(0.577) | 1.000    |

Sumber: Data Output STATA, 2019

**Independent T-Test**

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan CSR perusahaan yang terkoneksi politik lebih tinggi yakni 0.221 daripada perusahaan yang tidak terkoneksi politik yakni 0.144. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata 29.257 untuk perusahaan terkoneksi politik dan 27.811 untuk perusahaan yang tidak terkoneksi politik.

Variabel umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki rata-rata umur lebih tinggi yakni 33.311 tahun, sedangkan perusahaan yang tidak terkoneksi memiliki rata-rata umur lebih rendah yakni 32.292. Sedangkan variabel leverage menunjukkan rata-rata perbedaan yang juga tidak terlalu jauh, yakni untuk perusahaan yang terkoneksi memiliki rata-rata leverage yakni 1.167 dan perusahaan tidak terkoneksi memiliki leverage 1.184.

**Analisis Regresi OLS**

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan pengujian model 1, model 2, dan model 3. Pengujian model 1 menunjukkan hasil regresi terkait pengaruh koneksi politik (*DummyPolcon*) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSRI)

dengan menggunakan beberapa variabel kontrol. dalam pengujian regresi (Seifert et al., 2003). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa, koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada tingkat 1%.

Hasil pengujian regresi model kedua, yakni menguji pengaruh variabel moderasi PSTAB secara partial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel stabilitas politik juga turut mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, yakni berpengaruh positif, dengan tingkat signifikansi 10%.

Pada hasil regresi model 3 menunjukkan bahwa variabel moderasi atau interaksi antara koneksi politik dan stabilitas politik (*PolconPSTAB*) menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas politik tidak memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis kedua dari penelitian ini tidak didukung.

Tabel 4 Hasil Independent T-Test

| Variables | No Connection   | Connection      | Coef      | t-value |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|
|           | N=271<br>(mean) | N=299<br>(mean) |           |         |
| CSRI      | 0.144           | 0.221           | -0.078*** | -5.946  |
| FirmSize  | 27.811          | 29.257          | -1.447*** | -8.175  |
| ROA       | 0.024           | 0.024           | -0.000    | -0.010  |
| FirmAge   | 32.292          | 33.311          | -1.020    | -0.736  |
| Leverage  | 1.184           | 1.167           | 0.017     | 0.112   |

Sumber: Data Output

Tabel 5 Hasil Regresi OLS

| Variables   | (Model 1)<br>CSRI  | (Model 2)<br>CSRI  | (Model 3)<br>CSRI  |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DummyPolcon | 0.035***<br>(2.69) | 0.035***<br>(2.69) | 0.010<br>(0.16)    |
| FirmSize    | 0.025***<br>(8.65) | 0.025***<br>(8.65) | 0.026***<br>(8.65) |
| ROA         | 0.140***<br>(2.73) | 0.140***<br>(2.73) | 0.141***<br>(2.74) |

|                  |                               |                               |                               |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| FirmAge          | 0.001***<br>(3.60)            | 0.001***<br>(3.60)            | 0.001***<br>(3.59)            |
| Leverage         | -0.006*<br>(-1.89)<br>(-3.39) | -0.006*<br>(-1.89)<br>(-3.39) | -0.006*<br>(-1.89)<br>(-3.39) |
| PSTAB            |                               | 0.262*<br>(1.89)              | 0.289*<br>(1.90)              |
| PolconPSTAB      |                               |                               | -0.051<br>(-0.43)             |
| _cons            | -0.581***<br>(-6.75)          | -0.420***<br>(-3.57)          | -0.407***<br>(-3.35)          |
| Industry dummies |                               | Included                      |                               |
| Year dummies     |                               | Included                      |                               |
| r2               | 0.269                         | 0.269                         | 0.270                         |
| N                | 570                           | 570                           | 570                           |

### PENUTUP

Hasil pengujian model 1 menunjukkan bahwa variabel koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini berarti bahwa ketika perusahaan memiliki koneksi politik maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaannya akan semakin luas atau baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Li dkk (2014), Lin dkk (2015), Zhang (2017), Hillman (2016), dan Li dkk (2006). Penelitian ini sejalan pula dengan teori *rent-seeking*. Teori *rent-seeking* digunakan dalam sejumlah penelitian yang berkaitan dengan praktik CSR, yakni perusahaan-perusahaan yang terhubung secara politik cenderung lebih banyak terlibat dalam kegiatan CSR serta berinvestasi dalam CSR sebagai bentuk imbalan untuk dukungan pemerintah yang berkelanjutan (Li dkk., 2014). Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lin dkk (2015) dan (Zhang 2017) bahwa perusahaan yang membelanjakan lebih banyak CSR untuk terikat dengan pemerintah menerima imbalan masa depan yang lebih besar berupa subsidi pemerintah.

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa variabel stabilitas politik dalam penelitian ini hanya berperan sebagai variabel moderasi prediksi (*predictor moderator*) dalam model hubungan yang dibentuk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stabilitas politik mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara langsung, tanpa berinteraksi dengan koneksi politik.

Ketika stabilitas politik negara terganggu maka akan terganggu pula operasi perusahaan, baik itu secara negatif mempengaruhi perencanaan jangka panjang perusahaan, mempersulit perusahaan dalam perolehan pendapatan melalui dampak langsung (seperti pajak atau biaya) atau dampak tidak langsung (seperti biaya peluang yang hilang), menghambat perlindungan bisnis maupun dapat menakuti investor asing untuk berinvestasi. Semua hal tersebut kemudian akan berdampak pada kinerja perusahaan, terkhususnya kinerja keuangan perusahaan. Dan ketika kinerja keuangan perusahaan terganggu maka semakin besar kemungkinan bahwa perusahaan akan lebih fokus menangani dampak negatif atau kerugian yang timbul akibat gangguan politik tersebut dan lebih fokus pada memajukan kepentingan ekonomi perusahaannya, daripada mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan CSR, dan akibatnya semakin rendah nilai stabilitas politik negara maka semakin rendah pula pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. N. N., & Hossain, D. M. (2015). Climate Change and Global Warming Discourses and Disclosures In The Corporate Annual Reports: A Study on The Malaysian Companies. *Procedia-social and behavioral sciences*, 172, 246-253.  
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.361>
- Avram, D. O., Domnanovich, J., Kronenberg, C., & Scholz, M. (2018). Exploring The

- Integration of Corporate Social Responsibility Into The Strategies Of Small-And Medium-Sized Enterprises: A Systematic Literature Review. *Journal of cleaner production*, 201, 254-271. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.011>
- Boubakri, S. (2012). The Impact of The Financial Crisis on The Currency Risk Premium Dynamics Within The G20: Evidence From The ICAPM. *Brussels Economic Review*, 55(1).
- Fisman, R. (2001). Estimating the value of political connections. *American economic review*, 91(4), 1095-1102.
- Galvão, A., Mendes, L., Marques, C., & Mascarenhas, C. (2019). Factors Influencing Students' Corporate Social Responsibility Orientation in Higher Education. *Journal of cleaner production*, 215, 290-304. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.059>
- Harymawan, I., & Nowland, J. (2016). Political Connections And Earnings Quality: How Do Connected Firms Respond To Changes in Political Stability And Government Effectiveness?. *International Journal of Accounting & Information Management*, 24(4), 339-356. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-05-2016-0056>
- Hillman, A. J. (2016). Politicians on the Board of Directors: Do Connections Affect the Bottom Line? *Journal of Management*, 31(3), 464-481. doi:10.1177/0149206304272187
- Jones, G. (2017). *Profits And Sustainability: A History Of Green Entrepreneurship*. Oxford University Press.
- Khan, A., Mihret, D. G., & Muttakin, M. B. (2016). Corporate Political Connections, Agency Costs and Audit Quality. *International Journal of Accounting & Information Management*, 24(4), 357-374. doi:10.1108/ijaim-05-2016-0061
- Krueger, A. O. (1974). The Political Economy of The Rent-Seeking Society. *The American economic review*, 64(3), 291-303.
- Li, S., Song, X., & Wu, H. (2014). Political Connection, Ownership Structure, and Corporate Philanthropy in China: A Strategic-Political Perspective. *Journal of Business Ethics*, 129(2), 399-411. doi:10.1007/s10551-014-2167-y
- Li, Z. (2006). A Study on Relation of Corporate Social Responsibility And Corporate Value: Empirical Evidence From Shanghai Securities Exchange. *China Industrial Economy*, 2,77-83
- Lin, K. J., Tan, J., Zhao, L., & Karim, K. (2015). In The Name of Charity: Political Connections and Strategic Corporate Social Responsibility in a Transition Economy. *Journal of Corporate Finance*, 32, 327-346. doi:10.1016/j.jcorpfin.2014.10.007
- Liu, B., Lin, Y., Chan, K. C., & Fung, H.-G. (2018). The Dark Side of Rent-Seeking: The Impact of Rent-Seeking on Earnings Management. *Journal of Business Research*, 91, 94-107. doi:10.1016/j.jbusres.2018.05.037
- Luo, L., Tang, Q., & Lan, Y. (2013). Comparison Of Propensity for Carbon Disclosure Between Developing and Developed Countries. *Accounting Research Journal*, 26(1), 6-34. doi:10.1108/arj-04-2012-0024
- Muttakin, M. B., Mihret, D. G., & Khan, A. (2018). Corporate Political Connection and Corporate Social Responsibility Disclosures: A Neo-Pluralist Hypothesis and Empirical Evidence. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(2), 725-744. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2015-2078>
- Schmidt, M. A., & Cracau, D. (2017). A Cross-Country Comparison of the Corporate Social Responsibility Orientation in Germany and Qatar: An Empirical Study among Business Students. *Business and Professional Ethics Journal*. <https://doi.org/10.5840/bpej201712866>
- Seifert, B., Morris, S. A., & Bartkus, B. R. (2003). Comparing Big Givers And Small Givers: Financial Correlates of Corporate Philanthropy. *Journal of Business Ethics*, 45, 195-211. <https://doi.org/10.1023/A:102419941180>

Woodward, D. G., Edwards, P., & Birkin, F. K. (1996). Organizational Legitimacy and Stakeholder Information Provision. *British Journal of Management*, 7(4), 329-347. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.1996.tb00123.x>

Zhang, C. (2017). Political Connections And Corporate Environmental Responsibility: Adopting or Escaping?. *Energy Economics*, 68, 539-547. doi:10.1016/j.eneco.2017.10.036